

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Akuntansi Dana Umum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa proses akuntansi dimulai dari pencatatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum maupun pada buku kas pembantu. Penyusunan laporan ini dimulai dari penyusunan realisasi sampai Tri Wulan I, II, III, IV dan terakhir perhitungan anggaran yang merupakan laporan akhir tahun dari pelaksanaan anggaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten setiap tiga bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran, sehingga tidak banyak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Lampiran perhitungan APBD yang dibuat menyajikan hasil pelaksanaan anggaran satu periode berdasarkan data sekarang.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, setiap organisasi pemerintah mempunyai tujuan bahwa kegiatannya sesuai peraturan yang membatasinya, proses keuangan pada akhir periode anggaran dan pelaporan perubahan dana yang tersedia. Peraturan yang membahas dalam penyusunan laporan keuangan

mengakibatkan laporan yang disajikannya mempertanggungjawabkan dari segi akuntansinya saja dan yang dipentingkan hanyalah kebenaran secara formil dan teknis pelaksanaannya saja, dengan demikian laporan yang dihasilkannya menggambarkan anggaran dan realisasinya tanpa ada neraca yang bisa menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya dari unit pemerintah tersebut.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terutama mengenai anggaran rutin terdiri dari :

1. Perhitungan anggaran pendapatan daerah disertai dengan penjabaran realisasi anggaran pendapatan daerah tahun yang bersangkutan.
2. Perhitungan anggaran belanja daerah disertai penjabaran realisasi kegiatan pasal dari anggaran belanja daerah (anggaran rutin) pada tahun yang bersangkutan.

Semua susunan anggaran sesuai dengan bagian pos dalam mata anggaran masing-masing. Laporan tersebut menunjukkan hasil pelaksanaan anggaran, selisih yang terjadi dan sisa yang ada pada akhir pelaksanaan anggaran.

Sama halnya dengan akuntansi dana umum, dari dana umum juga dihasilkan laporan keuangan yang tidak berbeda jauh dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit pemerintah, sehingga pembuatan laporan keuangan menurut akuntansi dana dapat diselaraskan dengan perhitungan realisasi anggaran pendapatan belanja. Adapun laporan yang dihasilkan oleh akuntansi dana umum adalah neraca dan laporan analisis perubahan saldo dana.

Berikut ini anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk bulan Maret 2003.

Tabel 4.1
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Triwulan I Tahun Anggaran 2003
Per 31 Maret 2003

Uraian	Kode Anggaran	Jumlah
Taksiran Pendapatan :		
Sisa Anggaran Bulan Yang Lalu	1.1	Rp 1.957.617.800,00
Bagian Pendapatan Asli Daerah :	1.2	
Pos Pajak Daerah	1.2.1	Rp 702.000.600,00
Pos Retribusi Daerah	1.2.1	Rp 617.399.500,00
Pos Bagian Laba BUMD	1.2.3	Rp 113.833.500,00
Pos Lain-lain PAD Yang Sah	1.2.4	Rp 444.178.600,00
Bagian Dana Perimbangan :	1.3	
Pos Bagi Hasil Pajak	1.3.1	Rp 1.588.987.100,00
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1.3.2	Rp 76.929.250,00
Pos Dana Alokasi Umum	1.3.3	Rp 34.115.511.350,00
Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	1.5	
Pos Penerimaan Dari Propinsi	1.5.1	Rp 1.407.992.000,00
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :	1.6	
Pos Urusan Kas dan Perhitungan	1.6.1	Rp 3.227.739.200,00
JUMLAH		Rp 44.252.188.900,00

Appropriasi		
Belanja Rutin :	2.1	
Belanja Pegawai	2.1.1	Rp 27.777.179.350,00
Belanja Barang	2.1.2	Rp 2.402.468.400,00
Belanja Pemeliharaan	2.1.3	Rp 202.698.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.1.4	Rp 269.080.500,00
Belanja Operasional	2.1.5	Rp 113.006.000,00
Bantuan Keuangan	2.1.8	Rp 188.171.500,00
Pengeluaran Tidak Tersangka	2.1.10	Rp 9.274.700,00
Belanja Pembangunan	2.2	<u>Rp 10.192.795.000,00</u>
		Rp 41.154.673.450,00
Saldo Dana Tidak Dicadangkan		Rp 3.097.515.450,00
JUMLAH		Rp 44.252.188.900,00

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa taksiran pendapatan ditetapkan sebesar Rp 44.252.188.900,00 sedangkan jumlah appropriasi dari belanja rutin dan belanja pembangunan sebesar Rp 41.154.673.450,00 sehingga diperoleh saldo dana yang tidak dicadangkan sebesar Rp 3.097.515.450,00.

4.1.1 Membuat Jurnal Anggaran Triwulan I untuk bulan Maret 2003

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas maka dapat dibuat jurnal anggaran sebagai berikut :

Taksiran Pendapatan	Rp 44.252.188.900,00
Appropriasi	Rp 41.154.673.450,00
Saldo Dana Tidak Dicadangkan	Rp 3.097.515.450,00

Sistem pencatatan yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah sistem tata buku tunggal atau *single entry* atas dasar kas. Sedangkan dalam penerapan akuntansi dana umum menggunakan sistem tata buku berpasangan atau *double entry* atas dasar waktu yang dimodifikasi. Transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2003 sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Maret 2003 dibayar SPMU untuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 27.659.753,993,00.

2. Tanggal 3 Maret 2003 diterima pendapatan pajak daerah pada bendahara dari

Penerimaan Restoran	Rp	3.410.880,00
Penerimaan Hotel	Rp	4.811.112,00
Penerimaan Hiburan	Rp	5.207.188,00
Penerimaan Reklame	Rp	21.723.864,00
Penerangan Jalan	Rp	664.738.163,00
Penerimaan B.Galian Gol. C	Rp	9.445.533,00
Penerimaan ABT & APT	Rp	3.067.317,00
Penerimaan Parkir	Rp	4.726.113,00

3. Tanggal 6 Maret 2003 diterima pada bendahara kas dari penerimaan retribusi sebesar Rp 644.236.967,00.

4. Tanggal 10 Maret 2003 dibayar sesuai SPMU oleh bendahara untuk belanja barang sebesar Rp 2.280.018.536,00.

5. Tanggal 13 Maret 2003 diterima pada bendahara pendapatan laba BUMD dari :

Penerimaan BPD	Rp	4.583.300,00
Penerimaan PDAM	Rp	14.583.350,00

Penerimaan Apotik	Rp	4.666.667,00
Penerimaan Bank Pasar	Rp	66.708.333,00
Penerimaan BKK	Rp	4.992.167,00

6. Tanggal 18 Maret 2003 diterima pendapatan asli daerah yang sah oleh bendahara dari :

Penerimaan Jasa Giro	Rp	211.697.256,00
Penerimaan P. Pohon	Rp	416.700,00
Penerimaan lain-lain	Rp	184.107.300,00

7. Tanggal 18 Maret 2003 dibayar SPMU untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp 192.606.841,00.

8. Tanggal 20 Maret 2003 dikeluarkan oleh bendahara Belanja Perjalanan Dinas kas sebesar Rp 245.880.726,00.

9. Tanggal 22 Maret 2003 diterima pendapatan bagi hasil pajak pada bendahara kas dari :

Penerimaan PBB	Rp	910.756.578,00
Penerimaan BPHTF	Rp	179.075.160,00
Penerimaan PPh Ps. 21	Rp	299.635.420,00

10. Tanggal 24 Maret 2003 diterima pendapatan bagi hasil bukan pajak dari penerimaan :

SDAMB & Gas Alam	Rp	1.540.546,00
SDA Kehutanan	Rp	25.604.361,00
SDA Perikanan	Rp	587.342,00
SDA Pertambangan Umum	Rp	28.260.355,00

11. Tanggal 25 Maret 2003 diterima pendapatan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 34.115.511.333,00.

12. Tanggal 27 Maret 2003 dibayar SPMU untuk Belanja Operasional sebesar Rp 109.810.113,00.

13. Tanggal 28 Maret 2003 diterima pada bendahara penerimaan bantuan propinsi sebesar Rp 180.661.250,00.

14. Tanggal 29 Maret 2003 diterima langsung pada bendahara dari :

Penerimaan Iuran Wajib Pegawai	Rp 2.201.653.000,00
Penerimaan PPH	Rp 718.453.186,00
Penerimaan Tab. Perumahan	Rp 128.751.100,00

15. Tanggal 29 Maret 2003 dibayar SPMU untuk :

Bantuan keuangan lain-lain	Rp 171.650.285,00
Pengeluaran Tak Tersangka	Rp 4.886.400,00

16. Tanggal 31 Maret 2003 dikeluarkan SPMU untuk belanja pembangunan sebesar Rp 9.303.420.412,00.

Untuk penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Klaten juga membuat laporan sementara, yaitu setiap tiga bulan sekali (laporan triwulanan) dan pada akhir tahun dibuat laporan selama tahun yang bersangkutan.

Berikut ini metode analisis penerapan akuntansi dana umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode triwulan I bulan maret tahun 2003 bila menggunakan sistem tata buku berpasangan atas dasar waktu yang dimodifikasi.

4.1.2 Membuat Rekapitulasi Jurnal Operasi Selama Bulan Maret 2003.

Tabel 4.2
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Dana Umum
Jurnal Operasi
Tri Wulan I Tahun Anggaran 2003
Per 31 Maret 2003

Tgl	Keterangan	Pasal/ayat	Debit	Kredit
01-03-03	Belanja Gaji	2.1.1	Rp27.659.753.993,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp27.659.753.993,00
	Utang Voucher	5.1	Rp27.659.753.993,00	
	Kas	4.1		Rp27.659.753.993,00
03-03-03	Pinrang Pajak Daerah	4.5	Rp 717.130.170,00	
	Pendptn Pjk Daerah	1.2.1		Rp 717.130.170,00
	Kas	4.1	Rp 717.130.170,00	
	Pinrang Pjk Daerah	4.5		Rp 717.130.170,00
05-06-06	Kas	4.1	Rp 644.236.967,00	
	Pendptn Restribusi	1.2.2		Rp 644.236.967,00
07-03-03	Belanja Barang	2.1.2	Rp 2.280.018.536,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp 2.280.018.536,00
	Utang Voucher	5.1	Rp 2.280.018.536,00	
	Kas	4.1		Rp 2.280.018.536,00
13-03-03	Kas	4.1	Rp 95.533.817,00	
	Pendptan Laba BUMD	1.2.3		Rp 95.533.817,00
18-03-03	Kas	4.1	Rp 396.221.256,00	
	Pendptn PAD Lain Sah	1.2.4		Rp 396.221.256,00
18-03-03	Belanja Pemeliharaan	2.1.3	Rp 192.606.841,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp 192.606.841,00
	Utang Voucher	5.1	Rp 192.606.841,00	
	Kas	4.1		Rp 192.606.841,00
20-03-03	Belanja Perjalanan Dinas	2.1.4	Rp 245.880.726,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp 245.880.726,00

	Utang Voucher	5.1	Rp 245.880.726,00	
	Kas	4.1		Rp 245.880.726,00
22/03/03	Kas	4.1	Rp 1.389.467.158,00	
	Pendptn Bagi Hasil Pjk	1.3.1		Rp 1.389.467.158,00
24/03/03	Kas	4.1	Rp 55.992.604,00	
	Pendptn Bg Hsl Bkn Pjk	1.3.2		Rp 55.992.604,00
25/03/03	Kas	4.1	Rp34.115.511.333,00	
	Dana Alokasi Umum	1.3.3		Rp34.115.511.333,00
27/03/03	Belanja Operasional	2.1.5	Rp 109.810.113,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp 109.810.113,00
	Utang Voucher	5.1	Rp 109.810.113,00	
	Kas	4.1		Rp 109.810.113,00
28/03/03	Kas	4.1	Rp 180.661.250,00	
	Pndptn Lain-lain yg sah	1.5.1		Rp 180.661.250,00
29/03/03	Kas	4.1	Rp 3.048.857.286,00	
	Urusan Kas & Perbit	1.6.1		Rp 3.048.857.286,00
29/03/03	Belanja Lain-lain	1.5.1	Rp 176.736.685,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp 176.736.685,00
	Utang Voucher	5.1	Rp 176.736.685,00	
	Kas	4.1		Rp 176.736.685,00
31/03/03	Belanja Pembangunan	2.2	Rp 9.303.420.412,00	
	Utang Voucher	5.1		Rp 9.303.420.412,00
	Utang Voucher	5.1	Rp 9.303.420.412,00	
	Kas	4.1		Rp 9.303.420.412,00

Jurnal operasi di atas (tabel 4.2) digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan maret tahun 2003. Dari jurnal tersebut dapat diketahui akun yang didebit maupun yang dikredit serta jumlah saldo akun yang bersangkutan.

4.1.3 Membuat Neraca Saldo Dana Umum Pada Akhir Anggaran Bulan Maret 2003.

Setelah dilakukan pencatatan dalam bentuk jurnal terhadap transaksi, neraca saldo dapat disusun dengan menggabungkan akun-akun yang sama dan menentukan saldo setiap akun yang ada. Berikut ini neraca saldo untuk akhir bulan Maret 2003.

Tabel 4.3
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Dana Umum
Neraca Saldo
Tri Wulan I Tahun Anggaran 2003
Per 31 Maret 2003

Kode Anggaran	Uraian	Debit	Kredit
4.1	Kas	Rp 675.384.535,00	
3.1	Taksiran Pendapatan	Rp 44.252.188.900,00	
3.2	Appropriasi		Rp 41.154.673.450,00
1.2.1	Pendapatan Pjk Daerah		Rp 717.130.170,00
1.2.2	Pendapatan Retribusi		Rp 644.236.967,00
1.2.3	Pendapatan Laba BUMD		Rp 95.533.817,00
1.2.4	Pndptn Asli Daerah yg sah		Rp 396.221.256,00
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pjk		Rp 1.389.467.158,00
1.3.2	Pendptan Bg Hasil Bkn Pjk		Rp 55.992.604,00
1.3.3	Pendapatan DAU		Rp 34.115.511.333,00
1.5.1	Penerimaan Lain Yg Sah		Rp 180.661.250,00
1.6.1	Urusan Kas dan Prhitungan		Rp 3.048.857.286,00
2.1	Belanja Rutin	Rp 30.664.651.894,00	
2.2	Belanja Pembangunan	Rp 9.303.420.412,00	
	Saldo Dana Tdk Dicapalkan		Rp 3.097.360.450,00
	Total	Rp 84.895.645.741,00	Rp 84.895.645.741,00

Berdasarkan tabel neraca saldo (tabel 4.3) diatas dapat diketahui bahwa pada total saldo rekening yang didebit sebesar Rp 84.895.645.741,00 dan jumlah saldo rekening sisi kredit sebesar Rp 84.895.645.741,00 setelah ditambahkan saldo dana tidak dicadangkan.

4.1.4 Membuat Jurnal Penutup Pada Akhir Triwulan I Bulan Maret 2003.

Pada akhir periode triwulan I yaitu akhir bulan Maret 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus menutup akun-akun sementara. Akun-akun sementara yang ditutup tersebut adalah akun Taksiran Pendapatan, Pendapatan, Appropriasi, dan Belanja.

Jurnal yang diperlukan untuk menutup pendapatan adalah sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Rp 717.130.170,00
Taksiran Pendapatan Pajak Daerah	Rp 717.130.170,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan pajak daerah)	
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 644.236.967,00
Taksiran Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 644.236.967,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan retribusi daerah)	
Pendapatan Laba BUMD	Rp 95.533.817,00
Taksiran Pendapatan Laba BUMD	Rp 95.533.817,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan laba BUMD)	
Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 396.221.256,00
Taksiran Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 396.221.256,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan asli daerah yang sah)	

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 1.389.467.158,00
Taksiran Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 1.389.467.158,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan bagi hasil pajak)	
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 55.992.604,00
Taksiran Pendapatan Bagi Hasil Bkn Pajak	Rp 55.992.604,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan bagi hasil bukan pajak)	
Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp 34.115.511.333,00
Taksiran Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp 34.115.511.333,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan dana alokasi umum)	
Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Rp 180.661.250,00
Taksiran Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Rp 180.661.250,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan lain-lain yang sah)	
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	Rp 3.048.857.286,00
Taksiran Pendapatan Urusan Kas dan Perhit	Rp 3.048.857.286,00
(Jurnal untuk menutup pendapatan urusan kas dan perhitungan)	

Jurnal yang diperlukan untuk menutup appropriasi adalah sebagai berikut :

Appropriasi Rutin	Rp 30.664.651.894,00
Appropriasi Pembangunan	Rp 9.303.420.412,00
Belanja Rutin	Rp 30.664.651.894,00
Belanja Pembangunan	Rp 9.303.420.412,00

4.1.5 Laporan Keuangan Dana Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sampai akhir bulan maret 2003.

Laporan keuangan disajikan setelah neraca saldo disusun dan jurnal penutup dibuat. Laporan keuangan untuk Dana Umum pemerintah daerah Kabupaten Klaten berupa laporan pendapatan, belanja, dan perubahan saldo dana serta neraca disajikan dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5.

Tabel 4.4
Pemerintah daerah Kabupaten Klaten
Dana Umum
Laporan Pendapatan, Belanja, dan Perubahan Saldo Dana
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Maret 2003

Pendapatan		
1.2.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 717.130.170
1.2.2	Pendapatan Restribusi	Rp 644.236.967
1.2.3	Pendapatan BUMD	Rp 95.533.817
1.2.4	Pendapatan Lain-lain PAD	Rp 396.221.256
1.3.1	Pendapatan bagi hsl pajak	Rp 1.389.467.158
1.3.2	Pendapatan lg hsl bkn pjg	Rp 55.992.604
1.3.3	Pendapatan DAU	Rp34.115.511.333
1.5.1	Pendapatan lain-lain yg sah	Rp 180.661.250
1.6.1	Pendapatan Kas & perhitgn	<u>Rp 3.048.857.286,1</u>
	Total Pendapatan	Rp40.643.611.841,00
Belanja		
2.1	Belanja Rutin	Rp30.664.651.894
2.2	Belanja Pembangunan	Rp 9.303.420.412,1
	Total Belanja	<u>Rp39.968.072.306,00-</u>
	Kenaikan saldo dana	Rp 675.539.535,00
	Saldo bulan yang lalu	<u>Rp 1.957.617.800,00+</u>
	Saldo dana 31 Maret 2003	Rp 2.633.157.335,00

Dari tabel 4.4 dapat diketahui pendapatan yang terima dan belanja yang dikeluarkan selama bulan maret 2003, sehingga dapat diketahui pula saldo dana pada akhir bulan maret 2003 yaitu sebesar Rp 2.633.157.335,00.

Tabel 4.5
Pemerintah daerah Kabupaten Klaten
Dana Umum
Neraca
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Maret 2003

Kas	Rp 2.633.157.335,00	
Saldo dana tidak dicadangkan		Rp 2.633.157.335,00
Total	Rp 2.633.157.335,00	Rp 2.633.157.335,00

Setelah semua transaksi di jurnal dan saldo rekening yang sama ditentukan, maka tampak neraca seperti dalam tabel 4.5. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada sisi aktiva terdapat kas sebesar Rp 2.633.157.335,00 dan terdapat saldo dana tidak dicadangkan sebesar Rp 2.633.157.335,00.

4.1.6 Membuat Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama bulan Maret 2003.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tabel 4.6) disusun berdasarkan transaksi yang terjadi. Dari data tersebut dapat diketahui seluruh pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang terjadi beserta saldo dananya. Tabel 4.6 berikut ini menjelaskan rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sampai akhir Triwulan I.

Tabel 4.6
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Dana Umum
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003
Per 31 Maret 2003

Uraian	Kode Anggaran	Jumlah
Taksiran Pendapatan :		
Sisa Anggaran Bulan Yang Lalu	1.1	Rp 1.957.617.800,00
Bagian Pendapatan Asli Daerah :	1.2	
Pos Pajak Daerah	1.2.1	Rp 717.130.170,00
Pos Retribusi Daerah	1.2.1	Rp 644.236.967,00
Pos Bagian Laba BUMD	1.2.3	Rp 95.533.817,00
Pos Lain-lain PAD Yang Sah	1.2.4	Rp 396.221.256,00
Bagian Dana Perimbangan :	1.3	
Pos Bagi Hasil Pajak	1.3.1	Rp 1.389.467.158,00
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1.3.2	Rp 55.992.604,00
Pos Dana Alokasi Umum	1.3.3	Rp 34.115.511.333,00
Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	1.5	
Pos Penerimaan Dari Propinsi	1.5.1	Rp 180.661.250,00
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :	1.6	
Pos Urusan Kas dan Perhitungan	1.6.1	Rp 3.048.857.286,00
JUMLAH		Rp 42.601.229.641,00
Appropriasi :		
Belanja Rutin	2.1	Rp 30.664.651.894,00
Belanja Pembangunan	2.2	Rp 9.303.420.412,00
JUMLAH		Rp 39.968.072.306,00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Tabel 4.6 tersebut disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Klaten sampai akhir bulan maret (triwulan I) tahun 2003. Berdasarkan tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di atas dapat diketahui bahwa taksiran pendapatan dan hasil sebesar Rp 42.601.229.641,00 sedangkan pada bagian appropriasi sebesar Rp 39.968.072.306,00.

Data tentang perhitungan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja yang diperoleh dari pemerintah daerah kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2003 dapat dilihat pada lampiran 4.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada pemerintah daerah kabupaten Klaten (pada lampiran 4) dapat diterapkan metode pencatatan akuntansi dana umum berdasar kas sebagai berikut :

Tabel 4.7
Pemerintah Daerah Kab. Klaten
Dana Umum
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2003

No	Rekening	Debet	Kredit
1	Kas	Rp 38.732.870.000	-
2	Piutang Pajak	-	-
3	Pinjaman Pemerintah	-	-
4	Taksiran Pendapatan	Rp 502.593.396.000	-
5	Pengeluaran	Rp 483.962.193.226	-
6	Encumbrance	-	-
7	Pendapatan	-	Rp 499.848.534.469
8	Appropriasi	-	Rp 502.593.396.000

9	Cadangan Encumbrance	-	-
10	Saldo Dana	-	Rp 22.846.528.757
	Jumlah	Rp1.025.288.459.226	Rp1.025.288.459.226

Neraca saldo dana umum (lihat tabel 4.7) dapat diperoleh setelah dilakukan pencatatan terhadap semua transaksi, neraca saldo dapat disusun dengan menggabungkan akun-akun yang sama dan menentukan saldo setiap akun yang ada. Dari neraca saldo dapat dibuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan laporan analisis perubahan saldo dana.

Tabel 4.8

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Dana Umum

Neraca

Tahun Anggaran 2003

Kas	Rp 38.732.870.000	
Saldo dana tidak cadangkan		Rp 38.732.870.000
Total	Rp 38.732.870.000	Rp 38.732.870.000

Tabel 4.8 menunjukkan neraca pemerintah daerah kabupaten Klaten tahun anggaran 2003. Dari neraca tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kas sebesar Rp 38.732.870.000,00 pada sisi aktiva sedangkan pada sisi passiva terdapat akun saldo dana tidak dicadangkan sebesar Rp 38.732.870.000,00.

Laporan keuangan akuntansi dana umum untuk tahun anggaran 2003 juga dapat dilihat dalam laporan analisis perubahan saldo dana dalam tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Dana Umum
Analisis Perubahan Saldo Dana
Tahun Anggaran 2003

Saldo dana awal		Rp 23.491.414.000,00
Tambah		
Kelebihan Appropriasi diatas Pengeluaran		
- Taksiran Pendapatan	Rp 502.593.396.000	
- Pengeluaran dari Encumbrance	<u>Rp 483.962.193.226</u>	
		Rp 18.631.202.774,00
Kelebihan Pendapatan diatas taksiran		
- Pendapatan	Rp 499.818.534.469	
- Taksiran Pendapatan	<u>Rp 502.593.396.000</u>	
		(Rp 2.744.861.531,00)
Kurangi		
- Appropriasi	Rp 502.593.396.000	
- Taksiran Pendapatan	<u>Rp 502.593.396.000</u>	
		Rp -0-
Jumlah Saldo Dana		Rp 39.377.755.243,00

Pada tabel 4.9 menunjukkan analisis perubahan saldo dana yang menampilkan saldo dana yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten Klaten. Pada tabel tersebut didapatkan hasil dari jumlah saldo dana sebesar Rp 39.377.755.243,00 yang diperoleh dari saldo dana awal sebesar Rp 23.491.414.000,00 ditambah kelebihan appropriasi diatas pengeluaran encumbrance sebesar Rp 18.631.202.774,00 serta kelebihan pendapatan diatas taksiran minus Rp 2.744.861.531,00 dan dikurangi approsiasi dan taksiran pendapatan yang terjadi selama tahun 2003.

4.2 Hasil Analisis dan Penerapan

Salah satu tujuan tata pembukuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipeertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang.

Dari analisis yang telah dilaksanakan bisa disimpulkan bahwa tata buku dan tata usaha keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak lagi memadai sebagai penghasil informasi yang dikehendaki oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, antara lain adanya :

1. Tuntutan pembuatan anggaran kinerja yang memerlukan informasi keuangan yang lebih mendetail daripada yang telah dihasilkan melalui tata buku dengan *cash basis*.
2. Informasi mengenai pendapatan, biaya, dan investasi ketiganya tidak dapat dihasilkan oleh tata buku dengan *cash basis*.
3. Pengelolaan asset daerah dengan baik, di mana informasi mengenai penilaian asset ini tidak ada dalam tata buku keuangan daerah.
4. Tuntutan untuk meninggalkan *cash basis* yang digunakan dalam tata buku selama ini karena tidak dapat menghasilkan informasi untuk memenuhi prinsip dan standar akuntansi.

Walaupun administrasi keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupten Klaten kurang memadai, tetapi Pemerintah Daerah Kabupten Klaten sudah berusaha melakukan penyelenggaraan administrasi dengan sebaik-baiknya. Hal ini telah dibuktikan dengan :

1. Ketelitian dan ketepatan waktu dari pembukuan transaksi keuangan telah dipenuhi, hal ini dapat dilihat dalam mengerjakanb buku besar penerimaan dan buku besare pengeluaran telah telah diusahakan dengan mengisi semua kolom yang tersedia dengan memindahkan jumlah-jumlah berjalan (kumulatif) serta akhir tahun anggaran buku besar telah ditutup sebagaimana mestinya.
2. Pelaporan yang tepat waktu dari hasil operasi anggaran akan menjadi dasar dalam memastikan apakah operasi anggaran ini memenuhi ketentuan APBN

dan ketentuan Pemerintah Daerah, yaitu setiap pengeluaran anggaran telah sesuai dengan pendelegasian anggaran kepada bendaharawan daerah, baik untuk beban tetap maupun beban sementara telah dibukukan oleh bendaharawan yang bersangkutan ke dalam buku kas umum maupun ke dalam buku-buku pembantu, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1980.

3. Pembukuan dan pelaporan dari transaksi keuangan dan posisi keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan upaya :
 - a) Telah diusahakan informasi laporan keuangan secara relevan, dapat dibuktikan, tidak memihak dan dapat diperbandingkan.
 - b) Telah diusahakan setiap kali menerbitkan SPMU maka kepada bendaharawan yang bersangkutan lebih dahulu harus membayar dan menyelesaikan pertanggungjawaban buku sebelumnya.
 - c) Laporan tri wulan pelaksanaan APBD, telah diupayakan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa yang bersangkutan telah dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

namun demikian, peraturan dan perundangan diatas masih mempunyai kelemahan antara lain :

1. Pencatatan pelaksanaan anggaran masih terpisah-pisah, masih menggunakan tata buku tunggal / Single Entry.
2. Pengelompokan rekening perkiraan tidak dirancang untuk menganalisis efektifitas pembiayaan dan belanja operasional.
3. Proses perhitungan anggaran daerah relatif lama.
4. Akuntansi pemerintahan yang ada belum menyajikan informasi akuntansi secara manajerial.

Sehubungan dengan era baru, reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, dengan keluarnya undang-undang No. 22 tahun 1999 dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara tersirat dan tersurat dinyatakan dengan perlunya pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju akuntabilitas daerah, selain itu Inpres No. 7 tahun 1999 memberikan seperangkat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk penerapannya, khususnya dalam rangka pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif khususnya pemerintah daerah. Selain itu juga keluar PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta PP No 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Klaten masih menggunakan peraturan dan perundangan lama. Sedangkan hal yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan daerah Kabupaten Klaten adalah pengerjaan / pencatatan pada bagian keuangan yang belum menggunakan sistem komputerisasi. Hal ini bisa menghambat kelancaran dalam pekerjaan, serta menyebabkan kurangnya tingkat ketelitian / keakuratan informasi yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan akuntansi dana umum di pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih dilakukan dengan sistem pencatatan tunggal atas dasar kas yang mempunyai sifat sederhana. Penyelenggaraan akuntansi dana umum tersebut dibatasi oleh peraturan tertentu yang mengakibatkan laporan yang disajikan hanya mempertanggungjawabkan dari segi akuntansinya saja tanpa mengutamakan kebenaran secara formil dan teknis pelaksanaannya, sehingga laporan yang dihasilkan hanya menggambarkan anggaran dan realisasinya.
2. Bila dibandingkan dengan Akuntansi Dana Umum sistem pencatatan tunggal atas dasar kas, Akuntansi Dana Umum dengan sistem berpasangan atas dasar himpun yang dimodifikasi mempunyai beberapa kelebihan, yaitu :
 - a. Menghasilkan lebih banyak informasi dibandingkan tata buku dengan single entry, misalnya dihasilkannya neraca, laporan surplus/defisit anggaran, laporan perubahan ekuitas dana, dan laporan arus kas. Hal ini menyebabkan tujuan pertanggungjawaban makin terpenuhi melalui

neraca dan tujuan manajerial makin terpenuhi melalui laporan surplus/defisit anggaran.

- b. Menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem tata buku tunggal, sehingga informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dana umum dengan dasar himpun yang dimodifikasi lebih akuntabel dan transparan, sesuai dengan jiwa PP No. 105/2000.
 - c. Laporan yang dihasilkan dapat memacu pencapaian prestasi tiap departemen atau lembaga daerah agar prestasi yang dicapai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Jika dana umum dengan sistem berpasangan atas dasar himpun yang dimodifikasi digunakan, maka diperlukan perubahan atau penyesuaian terhadap alat pencatatan transaksi, jenis data, klasifikasi rekening, rekening dan laporan keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah Kab. Klaten dengan menganut sistem pencatatan tunggal atas dasar kas, yaitu :
- a. Merubah BKU dengan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama tahun anggaran.
 - b. Membuat buku besar setiap transaksi sejenis yang sering terjadi.
 - c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan analisis perubahan saldo dana.
 - d. Beberapa nama rekening yang digunakan dalam akuntansi dana umum terkadang tidak dijumpai dalam pengurusan keuangan pemda, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap rekening tersebut atau

setidaknya mencocokkan dua nama yang berbeda dengan fungsi yang sama, seperti rekening encumbrance dan rekening piutang atau utang pajak.

B. Saran-Saran

1. Meskipun penerapan akuntansi dana umum dengan menggunakan sistem tata buku berpasangan atas dasar himpun yang dimodifikasi lebih sulit, namun bila dibandingkan dengan sistem tata buku tunggal atas dasar kas ada beberapa kelebihan yang dimilikinya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut hendaknya pemda Klaten khususnya bagian keuangan perlu meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia atau pegawai melalui pelatihan, penataran dan training, terutama yang diadakan oleh departemen keuangan.
2. Penerapan akuntansi dana umum dengan tata buku berpasangan dapat dilakukan pada PEMDA Klaten, namun hal ini harus didukung dengan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terutama departemen keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi I BPFE. Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, (1999). *Aplikasi Akuntansi Pemerintah Di Indonesia*, CV. Mandar Maju.
- Nasution S, (2000). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, (2001) : *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4, BPFE. Yogyakarta.
- Bonny Siregar dan Baldrice Siregar, (2001). *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*, Edisi 2 STIE YKPN.
- National Committee of Governmental Accounting (1999), *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- IAI, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu, Jakarta Salemba Empat.
- Halim, Abdul, (2001). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat edisi I.
- Dody Hapsoro, (1992). *Akuntansi Dana Suatu Pengantar*, STIE YKPN Yogyakarta.
- Edward S.Lynn dan John W. Norvelle (1990). *Pengantar Akuntansi Dana (Akuntansi Pemerintahan)*, di sadur oleh Drs. Erwar Dk, dkk. Yogyakarta.
- Rosjidi, (1987). *Akuntansi Pemerintahan (Akuntansi Dana)*, Edisi I Cumlaude, Surabaya
- RI UU No. 105 Tahun 2000, Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*. LAN dan BPKP.
- PERMENDAGRI Nomer 903/2735/SJ. *Tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001*, LAN dan BPKP.

LAMPIRAN

Lampiran 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TANGGAL : 31 MARET 2004

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN/POS/AYAT	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.1.1.	<u>Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu</u>	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.1.1.000.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.528.944.000,00	22.288.967.164,00	(239.976.836,00)
1.2.1.	<u>Pos Pajak Daerah</u>	8.424.007.000,00	8.605.562.041,00	181.555.041,00
1.2.1.003.	Pajak Restoran	39.000.000,00	40.930.560,00	1.930.560,00
1.2.1.004.	Pajak Hotel	56.000.000,00	57.733.350,00	1.733.350,00
005.	Pajak Hiburan	60.000.000,00	62.486.250,00	2.486.250,00

1	2	3	4	6
1.2.1.006.	Pajak Reklame	210.000.000,00	260.686.328,00	50.686.372,00
007.	Pajak Penerangan Jalan	7.900.000.000,00	7.976.857.957,00	76.857.957,00
008.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	80.000.000,00	13.346.394,00	33.346.394,00
009.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	36.807.000,00	36.807.802,00	802,00
010.	Pajak Parkir	42.200.000,00	56.713.356,00	14.513.356,00
1.2.2.	<u>Pos Restribusi Daerah</u>	7.408.794.000,00	7.730.843.608,00	322.049.608,00
1.2.2.001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.882.550.000,00	1.815.322.290,00	(67.227.710,00)
002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	195.000.000,00	202.889.610,00	7.889.610,00
003.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	810.000.000,00	894.072.600,0	84.072.600,00
005.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	250.932.000,00	250.968.000,00	36.000,00
006.	Retribusi Pasar	1.350.000.000,00	1.401.576.935,00	51.576.935,00
009.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.004.000,00	4.000,00
012.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	391.590.000,00	418.530.508,00	26.940.508,00

1	2	3	4	5
1.2.2.013.	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	435.500.000,00	465.980.824,00	28.480.824,00
014.	Retribusi Terminal	195.000.000,00	196.054.200,00	1.054.200,00
015.	Retribusi Penyedotan Kakus	12.8000.000,00	15.060.000,00	2.260.000,00
019.	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.004.000,00	4.000,00
021.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	611.100.000,00	613.536.531,00	2.436.531,00
024.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	48.000.000,00	44.494.900,00	(3.505.100,00)
026.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	275.000.000,00	304.011.970,00	29.011.970,00
027.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	472.017.000,00	477.305.000,00	5.288.000,00
028.	Retribusi Ijin Gangguan	100.000.000,00	204.930.950,00	104.930.950,00
029.	Retribusi Ijin Trayek	14.105.000,00	15.343.600,00	1.238.600,00
030.	Retribusi Pemakaman Umum	4.000.000,00	3.350.000,00	(650.000,00)
031.	Retribusi SIUP	45.000.000,00	48.215.000,00	3.215.000,00
032.	Retribusi Pengaturan Perubahan Pemanfaatan Lahan	40.200.000,00	48.577.357,00	8.377.357,00
033.	Retribusi Penggantian Biaya Ijin Usaha Jasa Konstruksi	15.300.000,00	15.300.000,00	

1	2	3	4	5
1.2.034.	Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000,00	95.267.333,00	35.267.333,00
035.	Retribusi Ijin Dibidang Kesehatan	56.350.000,00	56.350.000,00	-
036.	Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bidang Pariwisata	7.550.000,00	6.880.000,00	(670.000,00)
037.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.800.000,00	23.818.000,00	2.018.000,00
1.2.3.	Pos Bagian laba BUMD	1.366.000.000,00	1.146.406.000,00	(219.594.000,00)
1.2.3.002.	Perusahaan Daerah Air Minum	175.000.000,00	175.000.000,00	-
003.	Perusahaan Daerah Percetakan	205.000.000,00	55.00.000,00	(150.000.000,00)
004.	Perusahaan Daerah Apotik	56.000.000,00	56.000.000,00	-
005.	Perusahaan Daerah Bank Pasar	871.000.000,00	800.500.000,00	(70.500.000,00)
006.	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	59.000.000,00	59.906.000,00	906.000,00
1.2.4.	Pos Lain-lain PAD yang Sah	5.330.143.000,00	4.806.155.515,00	(523.987.485,00)
1.2.4.001.	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	-	-	-
002	Jasa Giro	2.200.000.000,00	2.540.367.074,00	340.367.074,00
009.	Penjualan Barang Bongkaran	40.000.000,00	51.500.800,00	11.500.800,00

1	2	3	4	5
1.2.4.016.	Penebangan/Perempelan Pohon	5.000.000,00	5.000.000,00	-
030.	Penerimaan Lain-lain	3.085.143.000,00	2.209.287.641,00	(875.855.359,00)
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	439.677.132.000,00	437.351.932.487,00	(2.325.199.513,00)
1.3.1.	<u>Pos Bagi Hasil Pajak</u>	19.067.845.000,00	21.993.885.243,00	2.926.040.243,00
1.3.1.001.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.062.999.000,00	10.929.078.934,00	2.866.79.934,00
002.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.407.035.000,00	2.148.901.914,00	(258.133.086,00)
003.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 dan OPDN	3.277.811.000,00	3.595.625.056,00	317.814.056,00
004.	Retribusi PPh Pasal 21	5.320.000.000,00	5.320.279.339,00	279.339,00
1.3.2.	<u>Pos Bagi Hasil Bukan Pajak</u>	923.151.000,00	671.911.244,00	(251.239.756,00)
1.3.2.006.	Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam	14.500.000,00	18.486.557,00	3.986.557,00
007.	Sumber Daya Alam Kehutanan	241.311.000,00	307.252.333,00	65.941.333,00
008.	Sumber Daya Alam Perikanan	659.435.000,00	339.124.256,00	(320.310.744,00)
009.	Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	7.905.000,00	7.048.098,00	(856.902,00)
1.3.3.	<u>Pos Dana Alokasi Umum</u>	409.386.136.000,00	409.386.136.000,00	-

1	2	3	4	5
1.3.3.001.	Dana Alokasi Umum	374.120.000.000,00	374.120.000.000,00	-
002.	Dana Penyeimbang	-	-	-
1.3.4.	<u>Pos Dana Alokasi Khusus</u>	35.266.136.000,00	35.266.136.000,00	-
1.3.4.001.	Dana Reboisasi	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	-
002.	DAK Non Dana Reboisasi	-	-	-
1.3.5.	<u>Pos Dana Darurat</u>	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-
1.3.5.001.	Alokasi ABT – Bencana Alam Cadangan	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)
1.4.	<u>BAGIAN PINJAMAN DAERAH</u>	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)
1.4.1.	<u>Pos Pinjaman Dalam Negeri</u>	-	-	-
1.4.1.001.	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-
002.	Pinjaman dari Bank	-	-	-
003.	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
004.	Pinjaman dari Masyarakat	-	-	-
005.	Pinjaman dari Sumber Lainnya	-	-	-

1	2	3	4	5
1.4.2. 1.4.2.001.	Pos Pinjaman Luar Negeri Pinjaman dari Luar Negeri	- -	- -	- -
1.5.	<u>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH</u>	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
1.5.1. 1.5.1.001.	Pos Penerimaan dari Propinsi Bantuan Pembangunan dari Propinsi (2P O.A)	16.895.906.000,00 2.167.935.000,00	16.716.220.340,00 2.167.935.000,00	(179.685.660,00) -
006.	Bagian Penerimaan PKB BBNKB dari Propinsi	8.251.170.000,00	7.951.272.250,00	(299.897.750,00)
007.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.648.697.000,00	6.178.426.086,00	529.729.086,00
008.	Bantuan Lain-lain dari Propinsi	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)
009.	Bagian Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan	101.766.000,00	113.137.344,00	11.371.344,00
010.	Sumbangan Pihak III (Perhutani)	26.338.000,00	34.239.100,00	7.901.100,00
013.	Penerimaan Bagi Hasil Pungut Pajak/ ABT/API Propinsi Jawa Tengah	200.000.000,00	271.210.560,00	71.210.560,00
1.5.2. 1.5.2.001.	Pos Penerimaan dari Kab. / Kota lainnya	-	-	-
1.5.3. 1.5.3.001.	Pos Penerimaan Lain-lain	-	-	-
1.6.1.	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)

1	2	3	4	5
1.6.1.001.	Penerimaan Iuran Wajib Pegawai	28.068.568.000,00	26.419.836.071,00	(1.648.731.929,00)
003.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	8.982.765.000,00	8.621.438.232,00	(361.326.768,00)
005.	Penerimaan Potongan Tab. Uang Muka Perumahan Pegawai	1.681.537.000,00	1.545.013.000,00	(136.524.000,00)
	<u>REKAPITULASI</u>			
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.528.944.000,00	22.288.967.164,00	(239.976.836,00)
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	439.677.132.000,00	437.351.932.487,00	(2.325.199.513,00)
1.4.	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-
1.5.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
	JUMLAH 1.1. s/d 1.5.	502.593.396.000,00	499.848.534.469,00	(2.744.861.531,00)
1.6.	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)
	JUMLAH SELURUHNYA (1.1 s/d 1.6.)	541.326.266.000,00	536.434.821.772,00	(4.891.444.228,00)

**Lampiran 2. RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2003**

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.528.944.000,00	22.288.967.164,00	(239.976.836,00)
1.2.1.	Pos Pajak Daerah	8.242.007.000,00	8.605.562.041,00	181.555.041,00
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah	7.408.794.000,00	7.730.843.608,00	322.049.608,00
1.2.3.	Pos Bagian Laba BUMD	1.366.000.000,00	1.146.406.000,00	(219.594.000,00)
1.2.4.	Pos Lain-lain PAD yang Sah	5.330.143.000,00	4.806.155.515,00	(523.987.485,00)
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	430.677.132.000,00	437.351.932.487,00	(2.325.199.513,00)
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	19.067.845.000,00	21.993.885.243,00	2.926.040.243,00
1.3.2.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	923.151.000,00	671.911.244,00	(251.239.756,00)
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum	409.386.136.000,00	409.386.136.000,00	-
1.3.4.	Pos Dana Alokasi Khusus	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	-
1.3.5.	Pos Dana Darurat	5.600.000.000,00	-	(5.600.000.000,00)

1	2	3	4	5
1.4.	<u>BAGIAN PINJAMAN DAERAH</u>	-	-	-
1.4.1.	Pos Pinjaman dari Dalam Negeri	-	-	-
1.4.2.	Pos Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-
1.5.	<u>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH</u>	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
1.5.1.	Pos Penerimaan dari Propinsi			
1.5.2.	Pos Penerimaan dari Kab/Kota Lainnya	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
1.5.3.	Pos Penerimaan lain-lainnya	-	-	-
	JUMLAH SEMUA (1.1 s/d 1.5)	502.593.396.000,00	499.848.534.469,00	(2.744.861.531,00)
1.6.	<u>BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</u>	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)
	JUMLAH SEMUA (1.1. s/d 1.6)	541.326.266.000,00	536.434.821.772,00	(4.891.444.228,00)

Lampiran 3. RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2003

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	JUMLAH ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / KURANG DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Rutin	<u>380.279.856.000,00</u>	<u>372.321.148.278,00</u>	<u>(7.958.707.722,00)</u>
2.1.1	Belanja Pegawai	333.732.152.000,00	331.917.047.920,00	(1.815.104.080,00)
2.1.2	Belanja Barang	28.829.620.000,00	27.360.222.437,00	(1.469.397.563,00)
2.1.3	Belanja Pemeliharaan	2.432.376.000,00	2.311.282.093,00	(121.093.907,00)
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas	3.228.666.000,00	2.950.568.720,00	(278.397.280,00)
2.1.5	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	-	-	-
2.1.6	Sarana dan Prasarana Umum Daerah	1.356.062.000,00	1.317.721.360,00	(38.340.640,00)
2.1.7	Belanja Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	103.133.600,00	103.131.653,00	(1.347,00)
2.1.8	Belanja Pensiun dan Onderstand	-	-	-
	Bantuan Keuangan	2.258.056.000,00	2.059.803.413,00	(198.252.585,00)

2.1.0	Pengeluaran yang tidak termasuk belanja kap-elan	4.438.193.000,00	4.212.734.680,00	(235.460.320,00)
2.1.10	Pengeluaran Tidak Terangka	8.012.200.000,00	85.635.640,00	(1.802.630.000,00)
2.2	<u>Belanja Pembangunan</u>	122.313.547.000,00	111.641.044.948,00	(11.672.498.052,00)
2P.0.1	Sektor Pengelolaan Keuangan	500.000.000,00	472.913.955,00	(27.086.045,00)
2P.0.2	Sektor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	375.000.000,00	353.444.000,00	(21.556.000,00)
2P.0.3	Sektor Perusahaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
2P.0.4	Sektor Penanaman Modal dan Pemasaran Daerah	681.500.000,00	681.440.000,00	(60.000,00)
2P.0.5	Sektor Industri Perdagangan Koperasi dan PKM	2.916.250.000,00	2.880.828.310,00	(35.421.690,00)
2P.0.6	Sektor Pariwisata	955.950.000,00	952.660.140,00	(2.389.860,00)
2P.0.7	Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	4.593.500.000,00	4.444.892.770,00	(148.607.230,00)
2P.0.8	Sektor Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
2P.0.9	Sektor Pertambangan dan Energi	250.000.000,00	247.591.540,00	(2.408.460,00)
2P.0.10	Sektor Pemberdayaan Daerah	12.101.077.000,00	11.848.461.600,00	(343.515.400,00)
2P.0.11	Sektor Politik	1.003.500.000,00	1.001.724.100,00	(1.775.900,00)
2P.0.12	Sektor Hukum	409.123.000,00	301.088.010,00	(108.034.990,00)
2P.0.13	Sektor Ketertarikan dan Keretihan	1.181.915.000,00	1.145.954.460,00	(35.960.540,00)
2P.0.14	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan	-	-	-

	Opdragen	25.095.598.000,00	23.177.757.550,00	(1.917.840.650,00)
2P.0.15	Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	6.974.020.000,00	6.925.347.571,00	(48.672.429,00)
2P.0.16	Sektor Kependudukan dan Keluarga Kefjaan	1.256.785.000,00	908.406.935,00	(348.384.065,00)
2P.0.17	Sektor Agama	650.000.000,00	615.994.000,00	(34.006.000,00)
2P.0.18	Sektor Pemberdayaan Perempuan	95.000.000,00	95.000.000,00	-
2P.0.19	Sektor Informasi dan Kehumasan	266.500.000,00	261.284.051,00	(5.215.949,00)
2P.0.20	Sektor Sarana dan Prasarana Jalan	22.850.160.000,00	19.582.937.680,00	(3.277.222.320,00)
2P.0.21	Sektor Sarana dan Prasarana Irigasi	11.290.200.000,00	9.175.657.830,00	(2.114.542.170,00)
2P.0.22	Sektor Sarana dan Prasarana Gedung	3.815.800.000,00	3.667.681.700,00	(148.118.300,00)
2P.0.23	Sektor Pembangunan Perkotaan	2.682.500.000,00	2.085.886.720,00	(596.613.280,00)
2P.0.24	Sektor Penataan Ruang	147.500.000,00	147.100.000,00	(400.000,00)
2P.0.25	Sektor Lingkungan Hidup	490.000.000,00	479.843.800,00	(10.156.200,00)
2P.0.26	Sektor Pembangunan Perwilayahan	19.930.662.000,00	18.542.969.276,00	(1.387.692.724,00)
2P.0.27	Sektor Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.551.000.000,00	1.494.185.150,00	(58.814.850,00)
	Jumlah	502.593.396.000,00	483.962.193.226,00	(18.631.202.774,00)
	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)

LAMPIRAN 4

Perhitungan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2003

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN N	URATAN BAGIAN POS/AYAT	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.1.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.288.944.000,00	22.288.967.164,00	(2.999.976.836,00)
1.2.1	Pos Pajak Daerah	8.424.007.000,00	8.605.562.041,00	181.555.041,00
1.2.1.003	Pajak Restoran	39.000.000,00	40.930.560,00	1.930.560,00
004	Pajak Hotel	56.000.000,00	57.733.350,00	1.733.350,00
005	Pajak Hiburan	60.000.000,00	62.486.250,00	2.486.250,00
006	Pajak Reklame	210.000.000,00	260.686.328,00	50.686.328,00
007	Pajak Penerangan Jalan	7.900.000.000,00	7.976.857.957,00	76.857.957,00
008	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	80.000.000,00	113.346.394,00	33.346.394,00
009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	36.807.000,00	36.807.802,00	802,00
010	Pajak Parkir	42.200.000,00	56.713.356,00	14.513.356,00
1.2.2	Pos Restribusi Daerah	7.408.794.000,00	7.730.843.608,00	322.049.608,00

1.2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.882.550.000,00	1.815.322.290,00	(67.227.710,00)
1.2.2.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	193.000.000,00	202.889.600,00	7.889.600,00
003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	810.000.000,00	894.072.600,00	84.072.600,00
005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	250.932.000,00	250.968.000,00	36.000,00
006	Retribusi Pasar	1.350.000.000,00	1.401.576.935,00	51.576.935,00
009	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.004.000,00	4.000,00
012	Retribusi Pemakaran Kekayaan Daerah	391.590.000,00	418.530.508,00	26.940.508,00
013	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	435.500.000,00	463.980.824,00	28.480.824,00
014	Retribusi Terminal	195.000.000,00	196.054.200,00	1.054.200,00
015	Retribusi Penyedotan Kakus	13.800.000,00	13.060.000,00	(739.999,99)
019	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.004.000,00	4.000,00
021	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	611.100.000,00	613.536.531,00	2.436.531,00
024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	48.000.000,00	44.494.900,00	(3.505.100,00)
026	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	275.000.000,00	304.011.970,00	29.011.970,00
037	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	472.017.000,00	477.305.000,00	5.288.000,00
038	Retribusi Ijin Gangguan	100.000.000,00	204.930.950,00	104.930.950,00
039	Retribusi Ijin Trayek	14.105.000,00	15.343.600,00	1.238.600,00
030	Retribusi Pemakaman Umum	4.000.000,00	3.350.000,00	(650.000,00)
031	Retribusi SBU-P	45.000.000,00	48.215.000,00	3.215.000,00
032	Retribusi Pengaturan Pemanfaatan Lahan	40.200.000,00	48.577.357,00	8.377.357,00

033.	Penggantian Biaya Ijin Usaha Jasa Konstruksi	15.300.000,00	15.300.000,00	-
034.	Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000,00	95.267.333,00	35.267.333,00
035.	Retribusi Ijin Dibidang Kesehatan	56.350.000,00	56.350.000,00	-
036.	Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bidang Pariwisata	7.550.000,00	6.880.000,00	(670.000,00)
037.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.800.000,00	23.818.000,00	2.018.000,00
1.2.3.	Pos Bagian laba BUMD	1.366.000.000,00	1.146.406.000,00	(219.594.000,00)
1.2.3.002.	Perusahaan Daerah Air Minum	175.000.000,00	175.000.000,00	-
003.	Perusahaan Daerah Perectakan	205.000.000,00	55.000.000,00	(150.000.000,00)
004.	Perusahaan Daerah Apotik	56.000.000,00	56.000.000,00	-
005.	Perusahaan Daerah Bank Pasar	871.000.000,00	800.500.000,00	(70.500.000,00)
006.	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	59.000.000,00	59.906.000,00	906.000,00
1.2.4.	Pos Lain-lain PAD yg Sah	330.143.000,00	1.806.155.513,00	(523.987.483,00)
1.2.4.001.	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	-	-	-
002.	Jasa Giro	2.200.000.000,00	2.540.367.074,00	340.367.074,00
009.	Penjualan Barang Bongkaran	40.000.000,00	51.500.800,00	11.500.800,00
016.	Penebangan/Perempelan Pohon	5.000.000,00	5.000.000,00	-
030.	Penerimaan Lain-lain	3.085.143.000,00	2.209.287.641,00	(875.855.359,00)
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	439.677.132.000,00	437.351.932.487,00	(2.325.199.513,00)
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	19.067.845.000,00	21.993.885.243,00	2.926.040.243,00

1.3.1	001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.062.999.000,00	10.929.078.934,00	2.866.79.934,00
	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.407.035.000,00	2.148.901.914,00	(258.133.086,00)
	003	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 dan OPDN	3.277.814.000,00	3.595.625.056,00	317.814.056,00
	004	Restitusi PPh Pasal 21	5.320.000.000,00	5.320.279.339,00	279.339,00
1.3.2		Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	923.151.000,00	671.911.244,00	(251.239.756,00)
1.3.2	006	Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam	14.500.000,00	18.486.557,00	3.986.557,00
	007	Sumber Daya Alam Kehutanan	241.311.000,00	307.252.333,00	65.941.333,00
	008	Sumber Daya Alam Perikanan	659.435.000,00	339.124.256,00	(320.310.744,00)
	009	Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	7.905.000,00	7.048.098,00	(856.902,00)
1.3.3		Pos Dana Alokasi Umum	109.386.136.000,00	109.386.136.000,00	-
1.3.3	001	Dana Alokasi Umum	374.120.000.000,00	374.120.000.000,00	-
	002	Dana Penyeimbang	35.266.136.000,00	35.266.136.000,00	-
1.3.4		Pos Dana Alokasi Khusus	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	-
1.3.4	001	Dana Reboisasi	-	-	-
	002	DAK Non Dana Reboisasi	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	(5.000.000.000,00)
1.3.5		Pos Dana Darurat	5.000.000.000,00	-	-
1.3.5	001	Alokasi ABT - Bencana Alam Cadangan	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)
1.4		BAGIAN PINJAMAN DAERAH			
1.4.1		Pos Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
1.4.1	001	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-
	002	Pinjaman dari Bank	-	-	-
	003	Pinjaman dari Lembaga	-	-	-

	Kemangan Bukan Bank	-	-	-
004	Pinjaman dari Masyarakat	-	-	-
005	Pinjaman dari Sumber Lainnya	-	-	-
1.4.2	Pos Pinjaman Luar Negeri	-	-	-
1.4.2.001	Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-
1.5	<u>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH</u>	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
1.5.1	Pos Penerimaan dari Propinsi	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
1.5.1.001	Bantuan Pembangunan dari Propinsi (P O A)	2.167.935.000,00	2.167.935.000,00	-
006	Bagian Penerimaan PKB BBNKB dan Propinsi	8.251.170.000,00	7.951.272.250,00	(299.897.750,00)
007	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.648.697.000,00	6.178.426.086,00	529.729.086,00
008	Bantuan Lain-lain dari Propinsi	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)
009	Bagian Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan	101.766.000,00	113.137.341,00	11.371.341,00
010	Sumbangan Pihak III (Perhutani)	26.338.000,00	34.239.100,00	7.901.100,00
015	Penerimaan Bagi Hasil Pungut Pajak ABT/APF Propinsi Jawa Tengah	200.000.000,00	271.210.560,00	71.210.560,00
1.5.2	Pos Penerimaan dari Kab./Kota Lainnya	-	-	-
1.5.3	Pos Penerimaan Lain-lain	-	-	-
1.6.1	<u>Pos Urusan Kas dan Perhutungan</u>	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)
1.6.1.001	Penerimaan Iuran Wajib Pegawai	28.068.568.000,00	26.419.836.071,00	(1.648.731.929,00)
003	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	8.982.765.000,00	8.621.438.232,00	(361.326.768,00)
005	Penerimaan Potongan Lab.	-	-	-

	Tang Muka Perumahan Pegawai	1.681.537.000,00	1.545.013.000,00	(136.524.000,00)
	<u>REKAPITULASI</u>			
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.528.944.000,00	22.288.967.164,00	(239.976.836,00)
1.3	BAGIAN DANA PERimbangan	439.677.132.000,00	437.351.932.487,00	(2.325.199.513,00)
1.4	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAMA	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
	Jumlah 1.1. s/d 1.5.	502.593.396.000,00	499.848.534.469,00	(2.744.861.531,00)
1.6	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)
	Jumlah seluruhnya (1.1 s/d 1.6.)	541.326.266.000,00	536.434.821.772,00	(4.891.444.228,00)

BELANJA

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / KURANG DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Rutin	380.279.856.000,00	372.321.148.278,00	(7.958.707.722,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	333.732.152.000,00	331.917.047.920,00	(1.815.104.080,00)
2.1.2	Belanja Barang	28.829.620.000,00	27.360.222.437,00	(1.469.397.563,00)
2.1.3	Belanja Pemeliharaan	2.432.376.000,00	2.311.282.093,00	(121.093.907,00)
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas	3.228.966.000,00	2.950.568.720,00	(278.397.280,00)

2.1.5	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Daerah	1.356.062.000,00	1.317.721.360,00	(38.340.640,00)
2.1.6	Belanja Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	103.133.000,00	103.131.653,00	(1.347,00)
2.1.7	Belanja Pensiun dan Onderstand	-	-	-
2.1.8	Bantuan Keuangan	2.258.056.000,00	2.059.803.415,00	(198.252.585,00)
2.1.9	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain-lain	4.478.195.000,00	4.242.734.680,00	(235.460.320,00)
2.1.10	Pengeluaran Tidak Tersangka	3.861.296.000,00	58.636.000,00	(3.802.660.000,00)
2.2	Belanja Pembangunan	122.313.540.000,00	111.641.044.948,00	(10.672.495.052,00)
2P.0.1	Sektor Pengelolaan Keuangan	500.000.000,00	472.913.955,00	(27.086.045,00)
2P.0.2	Sektor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	375.000.000,00	353.444.000,00	(21.556.000,00)
2P.0.3	Sektor Pemeliharaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
2P.0.4	Sektor Penanaman Modal dan Pemasaran Daerah	681.500.000,00	681.440.000,00	(60.000,00)
2P.0.5	Sektor Industri Perdagangan Koperasi dan PKM	2.916.250.000,00	2.880.828.310,00	(35.421.690,00)
2P.0.6	Sektor Pariwisata	955.050.000,00	952.660.140,00	(2.389.860,00)
2P.0.7	Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	4.593.500.000,00	4.444.892.770,00	(148.607.230,00)
2P.0.8	Sektor Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
2P.0.9	Sektor Pertambangan dan Energi	250.000.000,00	247.591.540,00	(2.408.460,00)
2P.0.10	Sektor Pemberdayaan Daerah	12.191.977.000,00	11.848.461.600,00	(343.515.400,00)
2P.0.11	Sektor Politik	1.003.500.000,00	1.001.724.100,00	(1.775.900,00)
2P.0.12	Sektor Hukum	409.123.000,00	301.088.010,00	(108.034.990,00)
2P.0.13	Sektor Ketentraman dan Ketertiban	1.181.915.000,00	1.145.954.460,00	(35.960.540,00)
2P.0.14	Sektor Pendidikan	-	-	-

	Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25.095.598.000,00	23.177.757.350,00	(1.917.840.650,00)
2P.0.15	Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	6.974.020.000,00	6.925.347.571,00	(48.672.429,00)
2P.0.16	Sektor Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan	1.256.785.000,00	908.400.935,00	(348.384.065,00)
2P.0.17	Sektor Agama	650.000.000,00	615.994.000,00	(34.006.000,00)
2P.0.18	Sektor Pemberdayaan Perempuan	95.000.000,00	95.000.000,00	-
2P.0.19	Sektor Informasi dan Komunikasi	266.500.000,00	261.284.051,00	(5.215.949,00)
2P.0.20	Sektor Sarana dan Prasarana Jalan	22.860.160.000,00	19.582.937.680,00	(3.277.222.320,00)
2P.0.21	Sektor Sarana dan Prasarana Irigasi	11.290.200.000,00	9.175.657.830,00	(2.114.542.170,00)
2P.0.22	Sektor Sarana dan Prasarana Gedung	3.815.800.000,00	3.667.681.700,00	(148.118.300,00)
2P.0.23	Sektor Pembangunan Perkotaan	2.682.500.000,00	2.085.886.720,00	(596.613.280,00)
2P.0.24	Sektor Penataan Ruang	147.500.000,00	147.100.000,00	(400.000,00)
2P.0.25	Sektor Lingkungan Hidup	490.000.000,00	479.813.800,00	(10.186.200,00)
2P.0.26	Sektor Pembangunan Perwilayahan	19.930.662.000,00	18.542.969.276,00	(1.387.692.724,00)
2P.0.27	Sektor Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.551.000.000,00	1.494.185.150,00	(56.814.850,00)
	Jumlah	502.593.396.000,00	483.962.193.226,00	(18.631.202.774,00)
	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)

Lampiran 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003
Per 31 Desember 2003

Taksiran Pendapatan dan Hasil

Pos Sisa lebih anggaran Tahun. YLL	Rp	23.491.414.478,00
Pos Pajak Daerah	Rp	8.605.562.041,00
Pos Restribusi Daerah	Rp	7.730.843.608,00
Pos Bagian Laba BUMD	Rp	1.146.406.000,00
Pos Lain-lain PAD yang sah	Rp	4.806.155.515,00
Pos Bagi Hasil Pajak	Rp	21.993.885.243,00
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	671.911.244,00
Pos Dana Alokasi Umum	Rp	409.386.136.000,00
Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	Rp	16.716.220.340,00
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	<u>Rp</u>	<u>36.586.287.303,00</u>
	Rp	531.134.821.772,00

Appropriasi

a) Pengeluaran Rutin	Rp	372.321.148.287,00
b) Pengeluaran Pembangunan	<u>Rp</u>	<u>111.641.044.948,00</u>
	Rp	483.962.193.226,00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

1. Membuat Rekapitulasi Jurnal Anggaran yang diperlukan selama tahun 2003

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Jurnal Anggaran

Tahun Anggaran 2003

NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
	Sisa Lebih Perhitungan Th. YLL	Rp 23.491.414.478,00	
	Taksiran Pend. Pajak Daerah	Rp 8.605.562.041,00	
	Taksiran Pend. Restribusi Daerah	Rp 7.730.843.608,00	
	Taksiran Pend. BUMD	Rp 1.146.406.000,00	
	Taksiran Pend. Lain-lain PAD	Rp 4.806.155.515,00	
	Taksiran Pend. Bagi Hasil Pajak	Rp 21.993.885.243,00	
	Taksiran Pend. Bagi Hasil Bkn Pjk	Rp 671.911.241,00	
	Taksiran Pendapatan DAI	Rp 49.386.136.000,00	
	Taksiran Pend. Lain yang Sah	Rp 16.716.220.340,00	
	Kas dan Perhitungan	Rp 36.586.287.303,00	
	Appropriasi Rutin		Rp 372.321.148.287,00
	Appropriasi Pembangunan		Rp 111.641.044.948,00
	Saldo dari tidak dicadangkan		Rp 27.172.628.546,00

2. Membuat Rekapitulasi Jurnal Operasi selama tahun anggaran 2003

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
1.	Piutang Pjk Daerah	Rp 8.605.562.041	
	Pendapatan Pajak daerah		Rp 8.605.562.041
	Kas	Rp 8.605.562.041	
	Piutang Pajak Daerah		Rp 8.605.562.041
2.	Kas	Rp 7.730.843.608	
	Pendapatan Restribusi Daerah		Rp 7.730.843.608
3.	Kas	Rp 1.146.406.000	
	Pendapatan Laba BUMD		Rp 1.146.406.000
4.	Kas	Rp 4.806.155.515	
	Pendapatan PAD Lain Sah		Rp 4.806.155.515
5.	Piutang Bg Hsl Pjk	Rp 21.993.885.243	
	Pendptan Bg Hsl Pjk		Rp 21.993.885.243
	Kas	Rp 21.993.885.243	
	Piutang Bg Hsl Pjak		Rp 21.993.885.243
6.	Kas	Rp 671.911.244	
	Pendapatan Bg Isl Bkn Pjk		Rp 671.911.244
7.	Kas	Rp 409.386.136.000	
	Pendptan Dana Alokasi Umum		Rp 409.386.136.000
8.	Kas	Rp 16.716.220.303	
	Pendapatan Lain-lain yang Sah		Rp 16.716.220.303
9.	Kas	Rp 36.586.287.303	
	Urusan Kas / Perhitungan		Rp 36.586.287.303

10.	Belanja Rutin	Rp 372.321.148.287	
	Belanja Pembangunan	Rp 111.641.044.948	
	Utang Voucher		Rp 483.962.193.226
11	Utang Voucher	Rp 483.962.193.226	
	Kas		Rp 483.962.193.226

3. Membuat Neraca Saldo Dana Umum pada akhir anggaran tahun 2003

Pemerintah Daerah Kab. Klaten

Dana Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kas	Rp 23.491.414.000,00	
Taksiran Pendapatan	Rp 502.593.396.000,00	
Pendapatan		Rp 499.848.534.469,00
Appropriasi		Rp 502.593.396.000,00
Belanja	Rp 483.962.193.226,00	
Saldo dana tidak dicadangkan		Rp 7.605.072.757,00
Total	Rp1.010.047.003.226,00	Rp 1.010.047.003.226,00

4. Membuat Jurnal Penutup pada akhir anggaran tahun 2003

JURNAL PENUTUP

NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
1	Sisa lebih anggaran Tahun Y.L.L.	Rp 23.491.414.478,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 8.605.562.041,00	
	Pendapatan Restribusi Daerah	Rp 7.730.843.608,00	
	Pendapatan BUMN	Rp 1.146.406.000,00	
	Pendapatan Lain-lain PAD	Rp 4.806.155.515,00	
	Pendapatan bagi hasil pajak	Rp 21.993.885.243,00	
	Pendapatan bagi hasil bukan pajak	Rp 671.911.244,00	
	Pendapatan dana alokasi umum	Rp 49.386.136.000,00	
	Pendapatan lain-lain yang sah	Rp 16.716.220.340,00	
	Pendapatan Kas & perhitungan	Rp 36.586.287.303,00	
	Taksiran sisa lebih Th. Y.L.L.		Rp 23.491.414.478,00
	Taksiran Pend. Pajak Daerah		Rp 8.605.562.041,00
	Taksiran Pend. Rest. Daerah		Rp 7.730.843.608,00
	Taksiran Pend. BUMID		Rp 1.146.406.000,00
	Taksiran Pend. Lain PAD		Rp 4.806.155.515,00

	Taksiran Pend. bagi hsl pjg	Rp	21.993.885.243,00
	Taksiran Pend. bagi hsl bkn pjg	Rp	671.911.244,00
	Taksiran Pend. DAU	Rp	49.386.136.000,00
	Taksiran Pend. lain-lain yg sah	Rp	16.716.220.340,00
	Taksiran Pend. Kas & perhit	Rp	36.586.287.303,00
2.	Appropriasi Rutin	Rp	372.321.148.287,00
	Appropriasi Pembangunan	Rp	111.641.044.948,00
	Belanja Rutin	Rp	372.321.148.287,00
	Belanja Pembangunan	Rp	111.641.044.948,00



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

Condonga Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon: (0274) 881546 - 885376 - 883087 - 884019 - Fax. : 882589

092/317/9/11

Nomor : 716/DEK/10/Bag.Um/X/2004
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

05 Oktober 2004

Kepada Yth.
BAPPEDA Kabupaten Klaten
di Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Novi Dwi Astuti Budiarti
No. Mahasiswa : 01312252
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Karangtalun Karangdowo Klaten

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERANAN AKUNTANSI DANA UMUM SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA KABUPATEN KLATEN.

Dosen pembimbing : Dra. Prapti Antarwiyati, MS,Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan,

Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK 82.048



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Telp. (0272) 321040 Klaten

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072 / 315 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjab Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi ijin dari Dekan Fak. Ekonomi UII Yogyakarta Nomor : 716/DIK/10/Bag.Um/X/2004, Tanggal 5 Oktober 2004.
 - 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin u mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, Kepada :

- N a m a : Navi Dwi Astuti Budiarti
- Pekerjaan/Mahasiswa : Mhs. Fak. Ekonomi UII Yogyakarta
- Alamat : Karangtelun, Karangdowo, Klaten
- Penaggung Jawab : Drs. Suwarsono Muhammad, MA
- Judul / Tujuan : Untuk Membuat Skripsi dengan Judul: "PERAWAN AKUTAL DAAN UHUM SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA KABUPATEN KLATEN"
- L o k a s i : Kab. Klaten
- L a m a n y a : 3 Bulan (15 Oktober 2004 s/d 15 Januari 2005)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) exemplar.
2. Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi penguasa setempat.
3. Seluruh Biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri pemohon.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten, 15 Oktober 2004

An. BUPATI KLATEN

Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kab. Klaten Litbangji

Tembusan Surat ini dikirim kepada :

1. Dekan. Kesbanglihanus Kab. Klaten
2. Ka. LITB Kab. Klaten
3. Dekan Fak. Ekonomi UII Yogyakarta
4. Yang bersangkutan
5. ~~...~~

